

PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Judul : Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat

Nama : Iklan Manalu

NIM/BP : 13634/2009

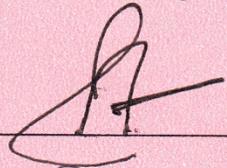
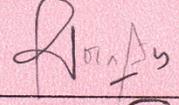
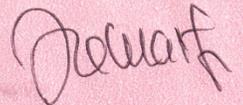
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Keahlian : Ekonomi Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, September 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Drs. Ali Anis, MS	1. 
2. Sekretaris	: Melti Roza Adry, SE.ME	2. 
3. Anggota	: Drs. Zul Azhar, M.Si	3. 
4. Anggota	: Joan Marta, SE, M.Si	4. 

ABSTRAK

Iklan Manalu (2009/13634) Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dibawah Bimbingan Bapak Drs, H. Ali Anis, M.S dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME

Penelitian ini bertujuan menganalisis Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Analisis desentralisasi fiskal difokuskan pada indikator kemandirian daerah, yang merupakan rasio total pendapatan asli daerah ditambah dengan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak terhadap total pengeluaran masing-masing daerah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan variabel penelitian dan menemukan ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan antara data *time series* data data *cross section*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumentasi, dari tahun 2008-2010. Teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif dan induktif. Analisis induktif mencakup 1) Uji Hausman 2) Chow-Test 3) Analisis Model Regresi Panel, hasil memilih pada REM. Untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan 1) Uji t dan 2) Uji F dengan taraf nyata 5%.

Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan dan positif antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara Desentralisasi Fiskal (Variabel bebas), Labor (Tenaga Kerja) dan Level awal GRDP (Variabel Kontrol) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/ kota Sumatera Barat. Sehubungan dengan hasil penelitian, maka saran yang direkomendasikan yaitu Dalam upaya meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah, maka dalam konteks desentralisasi fiskal pemberian kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur belanja daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat haruslah diseimbangkan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah tersebut. Selain desentralisasi fiskal yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan tenaga kerja yang profesional dan berpendidikan, karena variabel ini terbukti signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kasih karunia dan pertolonganNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat** ”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan khususnya kajian ekonomi publik serta untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Ali Anis, M.S selaku pembimbing I dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku pembimbing II sekaligus penasehat akademik penulis yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana serta izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku ketua dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu staf pengajar serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan pengetahuan dan proses administrasi yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
4. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat beserta staf dan karyawan yang telah membantu dalam proses pengambilan data skripsi.
5. Dan teristimewa penulis persembahkan kepada kedua orang tua serta keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis, dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang ini.
6. Rekan-rekan se-angkatan 2009 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAN GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
.....	
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	13
1. Otonomi Daerah.....	13
2. Pertumbuhan Ekonomi.....	16

a. Tenaga Kerja (<i>Labor</i>)	19
b. Level Awal PDRB	21
3. Desentralisasi Fiskal.....	22
a. Indikator penerimaan	27
b. Indikator pengeluaran	28
c. Indikator Otonomi	28
1) Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ...	29
4. Penelitian Terdahulu	32
B. Kerangka Konseptual	38
C. Hipotesis	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Variabel Penelitian	41
F. Defenisi Operasional.....	42
G. Teknik Analisis Data	43
a. Analisis Model Regresi Panel.....	43
1. Common Effect Model.....	39
2. Fixed Effect Model	45
3. Random Effect Model.....	45
a) Chow Test Model	45

b) Hausman Test Model.....	45
b. Koefisien Determinasi (R^2)	51
c. Pengujian Hipotesa	52
1. Uji t	52
2. Uji F	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	54
a. Letak Geografis Sumatera Barat.....	54
b. Iklim	55
c. Penduduk.....	56
d. Kemiskinan	57
2. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian	57
a. Pertumbuhan Ekonomi Kab/kota di Sumatera Barat	57
b. Desentralisasi Fiskal di Provinsi Sumatera Barat	60
3. Analisis Induktif	63
a. Model Regresi Panel.....	63
1) Pendekatan Common Effect Model.....	63
2) Pendekatan Fixed Effect Model	64
3) Pendekatan Random Effect Model.....	64
a) Chow-Test (Likelihood Ratio Test)	65

b) Husman Test	65
4) Analisis Model Regresi Panel	60
b. Koefisien Determinasi (R^2)	68
c. Pengujian Hipotesis	69
1. Uji t	69
2. Uji F	70
B. Pembahasan	70
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

1. Perkembangan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kab/kota Sumatera Barat tahun 2008-2010	7
2. PDRB Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2010 atas dasar Harga Konstan 2000	9
3. Daftar Studi Empiris Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	35
4. Luas Daerah, jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di KabupatenKota Sumatera Barat Tahun 2010-2010	56
5. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Berdasarkan Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2010	59
6. Perkembangan PAD kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2010	61
7. Rasio Pendapatan Asli Daerah ditambah dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Total Pengeluaran Kabupaten/Kota sumatera Barat Tahun 2008-2010	58
8. Hasil Regresi Common Effect Model.....	63
9. Hasil Regresi Fixed Effect Model.....	64
10. Hasil Regresi Random Effect Model	64
11. Hasil Chow Test.....	65
12. Hasil Hausman Test.....	66
13. Hasil Estimasi Regresi Panel	67

DAFTAR GAMBAR

1. Perkembangan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kab/kota Seluruh Indonesia tahun 2001-2011	5
2. Kerangka Konseptual	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-20102011.....	79
2. Pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera barat tahun 2008-20102011.....	80
3. Jumlah total pad ditambah dana bagi hasil pajak dan bukan pajak di provinsi sumatera barat tahun 2006 - 2010 (rupiah)	82
4. Realisasi pengeluaran pemerintah daerah menurut total komponen pengeluaran tahun 2008-2010 (rupiah)	84
5. Rasio Pendapatan Asli Daerah ditambah dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Total Pengeluaran Kabupaten/Kota sumatera Barat Tahun 2008-2010	83
6. Realisasi dana perimbangan menurut kabupaten/kota di provinsi sumatera barat tahun 2008 – 2010.....	84
7. PDRB kab/kota provinsi sumatera barat tahun 2008-2010 atas dasar harga konstan 2000 dalam juta rupiah	85
8. Level Awal PDRB (t-1) kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun 2008-2010 atas dasar harga konstan 2000 dalam juta rupiah.....	86
9. Hasil Regresi Common Effect Model.....	87
10. Hasil Regresi Fixed Effect Model	88
11. Hasil Regresi Random Effect Model.....	89
12. Hasil Chow test.....	90

13. Hasil Hausman test	91
14. Hasil estimasi regresi panel	92
15. Table t	93
16. Table F	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai saat ini desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan topik pembicaraan yang menarik untuk didiskusikan. Sejak Januari 2001 bangsa dan negara Indonesia melalui babak baru penyelenggaraan pemerintahan. Ini disebabkan studi tentang desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan dimensi lain seperti politik, administratif, dan geografis.

Hal ini menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengaktualisasikan kebutuhan penduduk dengan cepat, karena masyarakat dapat menggunakan suara-suara dan hak-hak mereka langsung pada pemerintah daerah yang berada pada wilayah masing-masing.

Hasil studi beberapa ahli menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Xie, et al (1999) dalam penelitiannya pada Negara bagian amerika serikat selama periode 1948 sampai dengan 1994 membuktikan bahwa desentralisasi fiskal kurang menguntungkan bagi pembangunan. Simpulan yang sama juga diperoleh dari hasil penelitian Zhang dan Zou (1998) yang mengobservasi pertumbuhan ekonomi regional di China dalam kurun waktu tahun 1980 sampai dengan

tahun 1992, yaitu bahwa desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konteks desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, beberapa penelitian yang dilakukan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dengan menggunakan model analisis ekonometrika, juga menghasilkan simpulan yang berbeda. Disatu pihak, hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana hasil penelitian Wibowo (2008), dan Waluyo (2007).

Meskipun demikian Hidayat (2005) berpendapat bahwa persoalan desentralisasi sesungguhnya belum mencapai suatu titik akhir. Perbedaan tersebut bukan berarti bahwa studi tentang desentralisasi sedang mengalami krisis. Ini adalah proses untuk menemukan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan aplikatif. Secara umum diyakini desentralisasi fiskal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini dilandasi oleh pandangan yang menyatakan kebutuhan masyarakat daerah terhadap pendidikan dan barang publik pada umumnya akan terpenuhi dengan lebih baik dibandingkan bila langsung diatur oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia memasuki paradigma baru dengan dilakukannya amandemen terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memberikan kewenangan yang luas bagi daerah dalam mengatur tata laksana pemerintahannya sendiri termasuk di dalamnya kewenangan dibidang keuangan daerah.

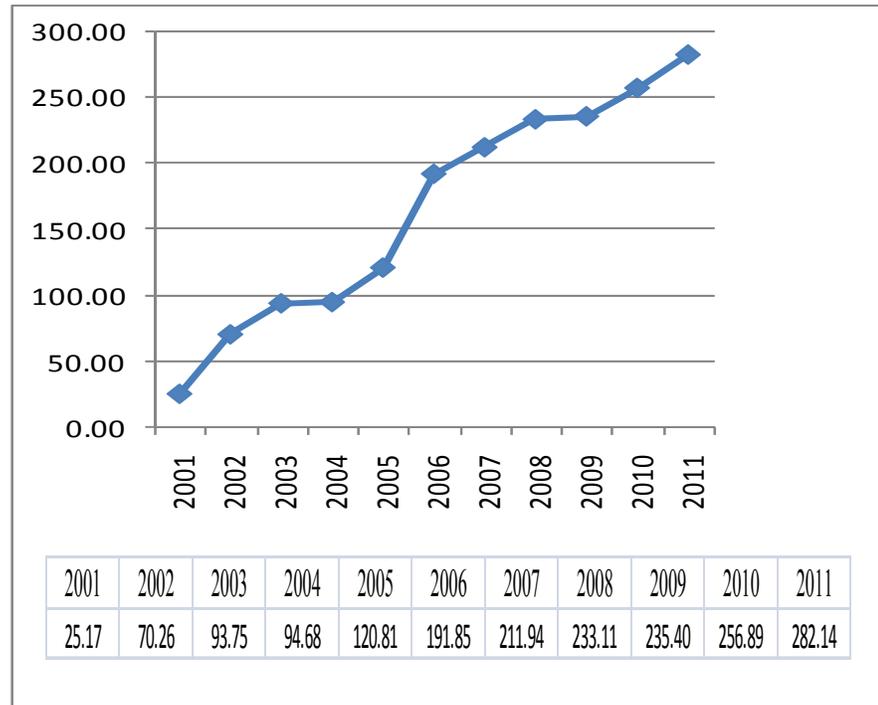
Dengan terbitnya undang-undang tersebut di atas, maka sistem hubungan lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan, baik secara vertikal yakni hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, maupun hubungan secara horizontal antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Perubahan yang paling nyata dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengurus pemerintahan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Adapun tujuan dari ditetapkannya kebijakan ini adalah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2005, “Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Desentralisasi fiskal yang diterapkan ini diharapkan akan membantu pemerintah daerah dalam ketersediaan dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan daerahnya, dengan asumsi bahwa pemerintah daerah sudah jauh lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya dan dapat mengelola penggunaan

dana lebih baik. Sumber penerimaan digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut UU No. 33 tahun 2004 adalah : Pendapatan Asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. menurut UU No. 33 tahun 2004, dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi *vertical* dan *horizontal imbalances* antar daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 cukup terlihat dengan adanya dana perimbangan yang dilimpahkan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Dana Perimbangan tersebut adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dilihat dari sisi penerimaan kabupaten/kota disetiap provinsi khususnya Sumatera Barat, bahwa kontribusi Dana Perimbangan cukup tinggi bagi pendapatan daerah di seluruh pemerintahan daerah kabupaten/kota Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui pelimpahan fiskal yang cukup banyak ke pemerintah daerah.

Gambar 1
Perkembangan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kab/Kota
Seluruh Indonesia Tahun 2001 – 2011



Sumber : BPS Sumbar, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi 2001 – 2011, Data Diolah.

Pada grafik di atas, pelaksanaan desentralisasi fiskal ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pada awal desentralisasi fiskal, transfer dana berupa Dana perimbangan hanya sebesar Rp. 25,17 triliun meningkat sebesar 179,14 % ditahun 2002 menjadi Rp. 70,26 triliun. Tahun 2006 Dana perimbangan telah mencapai Rp. 191,85 Triliun atau meningkat 58,80 % dari Tahun sebelumnya. Sampai Tahun 2011, besarnya dan perimbangan telah mencapai Rp. 282,14 Triliun. Besarnya dukungan pendanaan untuk menjalankan

urusan/kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah tersebut akan membantu kemandirian suatu daerah dalam mencapai tingkat perekonomian yang tinggi bagi daerah tersebut.

Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sangat tergantung pada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, sehingga diharapkan *local government spending* tersebut akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya keberhasilan sebuah daerah dalam mengelola dan membelanjakan keuangannya, dengan pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itulah dalam program pelaksanaan desentralisasi fiskal, dana perimbangan diharapkan mempunyai kontribusi dalam pembelanjaan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, karena satu hal yang pasti, bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun pemerintahan tingkat provinsi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi dari masing-masing daerah yang ada.

Seperti terlihat dalam Gambar 1 memperlihatkan adanya peningkatan transfer dana perimbangan yang cukup besar sampai tahun 2011. Sama halnya dengan jumlah dana yang mengalir dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Sumatera barat dalam bentuk dana perimbangan juga semakin meningkat, sebagaimana terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 1
Perkembangan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera barat Tahun 2008 – 2010 (Miliar Rupiah)

NO	Kab/Kota	2008	2009	2010
1	Kep.mentawai	322,170,528,832	339,157,781,000	349,720,456,665
2	Pesisir Selatan	520,707,718,100	535,961,582,000	544,513,285,000
3	Solok	443,105,866,120	439,362,845,000	492,563,810,411
4	Sijunjung	333,592,321,702	338,735,910,000	347,137,441,898
5	Tanah Datar	444,849,483,976	460,020,716,000	459,592,731,000
6	Padang Pariaman	490,452,239,627	497,009,621,000	491,152,419,016
7	Agam	499,184,206,011	494,596,497,000	514,796,260,119
8	Lima Puluh Kota	467,630,809,000	484,420,594,000	487,125,011,079
9	Pasaman	367,727,883,917	386,856,137,000	384,690,939,147
10	Solok Selatan	279,550,363,830	299,909,451,000	301,261,825,667
11	Dharmasraya	315,724,838,083	318,986,888,000	333,450,451,531
12	Pasaman Barat	378,790,419,700	400,590,502,000	428,562,124,525
13	Kota Padang	727,341,517,061	732,818,456,000	866,142,644,640
14	Kota Solok	255,912,134,420	261,317,608,000	242,829,016,609
15	Kota Sawahlunto	236,072,561,000	255,712,964,000	239,611,108,000
16	Kota Padang Panjang	239,306,486,000	250,249,556,000	252,000,358,000
17	Kota Bukittinggi	283,656,384,152	292,175,765,000	279,481,878,176
18	Kota Payakumbuh	277,844,363,557	290,787,246,000	277,361,235,695
19	Kota Pariaman	279,436,567,109	286,397,912,000	277,186,844,147
20	Total	7,163,056,692,197	7,365,068,031,000	7,569,179,841,325

Sumber :BPS Sumbar, Statistik keuangan tahun 2006 – 2010, data diolah.

Pada table 1 memperlihatkan adanya peningkatan jumlah dana perimbangan pada setiap daerah dalam setiap tahunnya. Mengingat besarnya dukungan pendanaan untuk menjalankan urusan/kewenangan yang telah diserahkan tersebut, pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat diharapkan mampu mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang semakin efisien

dan efektif. Sehingga dapat membuktikan bahwa desentralisasi fiskal adalah stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi Regional adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sehubungan dengan desentralisasi fiskal, terdapat kondisi makro ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat paska desentralisasi yang menunjukkan pengaruh positif. Terdapat beberapa indikator untuk melihat kinerja pembangunan daerah, salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Seperti terlihat pada tabel 2.

Pada tabel di bawah terlihat PDRB Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat berdasarkan harga konstan 2000 mengalami pertumbuhan yang positif disetiap tahunnya. Data dibawah merupakan data paska desentralisasi mulai dilaksanakan. Pada tahun 2008 PDRB Seluruh kab/kota mengalami pertumbuhan sebesar 2.039.576.12 (Juta Rupiah) atau sebesar 6.09 % dari tahun 2007. Beranjak pada tahun 2009 yang mengalami pertumbuhan sebesar 1.898.251.05 (Juta Rupiah) atau sebesar 5.35 % dari tahun 2008 dan terakhir adalah tahun 2010 PDRB meningkat sebesar 2.197440.49 atau sebesar 5.87 % dari tahun 2009, artinya dari tahun 2008-2010 menunjukkan adanya pertumbuhan PDRB kab/kota yang positif.

Tabel 2
PDRB Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 - 2010 Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Dalam Juta Rupiah (Setelah Desentralisasi)

No	Kab/Kota	2008	2009	2010
1	Kep.mentawai	486,658.71	509,396.33	534,232.35
2	Pesisir Selatan	1,899,032.79	2,002,248.56	2,107,966.19
3	Solok	1,926,826.54	2,047,621.51	2,175,125.54
4	Sijunjung	1,205,702.94	1,273,140.01	1,343,278.00
5	Tana Datar	2,331,745.79	2,468,737.03	2,614,193.29
6	Padang Pariaman	2,645,119.06	2,749,336.74	2,890,752.90
7	Agam	2,792,967.48	2,929,871.69	3,096,174.72
8	Lima Puluh Kota	2,545,801.72	2,684,575.15	2,846,148.54
9	Pasaman	1,214,884.21	1,289,261.24	1,368,459.79
10	Solok Selatan	579,478.58	614,813.74	653,447.15
11	Dharmasraya	1,020,079.52	1,088,105.30	1,158,557.52
12	Pasaman Barat	2,394,934.54	2,544,855.11	2,707,342.74
13	Kota Padang	10,797,259.04	11,345,637.06	12,021,549.50
14	Kota Solok	473,694.17	497,623.06	527,270.63
15	Kota Sawahlunto	474,379.28	494,392.38	519,599.06
16	Kota Padang Panjang	373,245.04	396,823.88	420,842.59
17	Kota Bukittinggi	918,914.69	969,590.89	1,028,923.29
18	Kota Payakumbuh	774,485.72	818,071.97	871,654.05
19	Kota Pariaman	656,273.02	685,632.24	721,656.53
Jumlah Total		35,511,482.84	37,409,733.89	39,607,174.38

Sumber : BPS Sumatera Barat, Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat (Tinjauan PDRB Prov Sumbar dan Kab/Kota menurut lap.usaha), Data Diolah.

Nilai PDRB tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya fenomena dan keterlibatan program desentralisasi fiskal yang dilakukan pemerintah sejak tahun 2001. Kembali pada tujuan dilaksanakan program desentralisasi yang salah satunya adalah untuk pembangunan antar wilayah. Pembangunan wilayah tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi yang ada pada suatu

daerah tertentu. Sehubungan dengan hal itu bahwa pertumbuhan ekonomi dapat direfleksikan dari indikator PDRB yang bertumbuh dalam periode tertentu. Selain mengingat tujuan dari program desentralisasi fiskal yang ada, keberhasilan sebuah daerah dalam mengelola keuangannya yang terlihat dari penyediaan pelayanan publik (barang dan jasa), juga turut memperlihatkan adanya kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional.

Berdasarkan fenomena dan data yang ada, pengaruh desentralisasi begitu luas dan menunjukkan pengaruh positif bagi perubahan pembangunan ekonomi Sumatera Barat, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat.

B. Identifikasi Masalah

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan ataupun program pemerintah yang tujuannya adalah membantu tercapainya tujuan kebijakan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan nasional secara keseluruhan. Melalui program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 ini, diharapkan selain menghasilkan pengadaan pelayanan yang efisien dan adil melalui pemanfaatan pengetahuan lokal tetapi juga akan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal yang akan berpengaruh pada pertumbuhan nasional. Untuk itulah kewenangan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluarannya akan turut serta mendorong

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Melihat fenomena yang terjadi, dengan adanya berbagai bentuk dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, apakah akan mampu merangsang dan mendorong bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, tentunya perlu memperhatikan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan, pengabaian terhadap faktor-faktor atau yang menjadi variabel yang memiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, akan menghasilkan hasil yang bias. Variable kontrol pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tenaga Kerja (*Labor*), dan Level Awal Pendapatan Regional (Level Awal PDRB).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah : Sejauhmanakah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini akan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi serta salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemegang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal yang tentunya mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat.
3. Penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan pembaca lainnya untuk menambah ilmu yang berkaitan dengan desentralisasi Fiskal di wilayah Sumatera Barat.
4. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa/kata latin yaitu “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti “aturan”. Sehingga otonomi diartikan sebagai “aturan sendiri” atau “pengundangan sendiri”, mengatur, atau memerintah sendiri. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut diatas bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Otonomi daerah yang telah berlangsung kurang lebih 12 tahun di negara kita diharapkan bukan hanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah dari ke pemerintah pusat. Dalam Sujamto (1998:3) menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut diterangkan juga bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk

memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Berbagai manfaat dan argument yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sebagai yang terbaik. Berbagai kelemahan masih menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaannya. Sugiyanto (2000) mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara lain :

1. Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin
2. Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal
3. Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya *public hearing*.
4. Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.

Dari pendapat sugianto diatas, bahwa kelemahan dalam otonomi daerah memang terlihat jelas dengan apa yang terjadi di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa otonomi daerah adalah pelimpahan kekuasaan, baik perencanaan, pelaksanaan, dan semua yang bersangkutan dalam peyediaan pelayanan dan kesejahteraan daerah. Hal inilah yang membentuk ruang adanya kesenjangan diantara daerah kaya dengan daerah miskin, karena setiap pemerintah akan sibuk dengan daerahnya sendiri, dan pemerintah

pusatpun tidak banyak mengikut sertakan kebijakan dalam pembangunan daerahnya. Korupsi juga demikian hal yang sangat harus diperhatikan oleh adanya otonomi daerah, oleh karena adanya ruang yang banyak yang secara otomatis tersedia dalam pelaksanaan otonomi daerah ini. Para pejabat-pejabat pemerintah ataupun jajaran-jajaran yang duduk di kursi pemerintahan daerah yang tidak menutup kemungkinan berhubungan dengan pengusaha-pengusaha dalam tata pelaksanaan pembangunan, seakan bebas untuk menyibukkan diri untuk kepentingan sendiri dalam menggelembungkan kekayaannya, oleh karena berkurangnya campurtangan pemerintah pusat baik pengawasan keuangan, maupun pengawasan program terlaksana yang ada didaerah.

Stabilisasi perekonomian yang semakin terancam juga merupakan dampak dari program pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan adanya ketidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal. Berbicara kebijakan fiskal adalah mengenai kebijakan dan pengaturan keuangan daerah. Jika pemerintah tidak bijak dalam pengelolaan keuangan dan alokasi keuangan tersebut, hal inilah yang akan membuat adanya kegagalan dalam perekonomian yang ada, atau akan membawa dampak yang sangat buruk bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena yang dialami dunia. Secara umum Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang atau jasa. Sedangkan secara lebih jelasnya dan terinci, Kuznet dalam Jhingan (2003) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang suatu Negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada penduduknya, dimana kenaikan kapasitas/kemampuan tersebut tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Menurut Sukirno (2013:9) bahwa pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Perkembangan kegiatan perekonomian menunjukkan adanya pertambahan kesibukan-kesibukan masyarakat terkait dalam perekonomian. Seperti kita ketahui bahwa suatu wilayah yang memiliki tingkat kegiatan perekonomian yang tinggi akan terlihat lebih maju dan makmur dibanding dengan kegiatan perekonomian yang rendah. Hal ini disebabkan perputaran uang dalam wilayah tersebut lebih cepat dan

otomatis penyediaan barang dan pelayanan publik juga akan semakin meningkat.

Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi dititik beratkan pada teori yang dikemukakan Solow yang merancang bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian.

Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dalam persamaan

$$Y = f(K, L, T).$$

Analisis Solow membuat pembuktian secara empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut: *faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang terpenting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.*

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa, suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produk barang/jasa yang dihasilkan melalui aktivitas ekonomi mengalami peningkatan atau kenaikan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Mankiw (2003), untuk mengukur kinerja ekonomi atau tingkat pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto merupakan ukuran yang sering digunakan, dimana PDRB

meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu.

Berdasarkan pendekatan sejarah pertumbuhan negara-negara di dunia, Rostow mencetuskan suatu model tahapan pertumbuhan ekonomi (*the stage of economic growth*). Menurutnya bahwa proses pertumbuhan dapat dibedakan ke dalam lima tahap dan setiap negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahapan tersebut. Adapun lima tahapan pertumbuhan tersebut antara lain ; masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas,, lepas landas, gerakan kearah kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi (Todaro, 2004:129).

Todaro (2004:92) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap Negara. Ketiga faktor tersebut adalah:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Menurut teori Klasik, akumulasi modal serta jumlah tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Smith menyebutkan ada tiga unsur pokok dalam produksi suatu negara, yaitu :

- a. Sumber daya yang tersedia, yaitu tanah.
- b. Sumber daya insan, yaitu jumlah penduduk.
- c. Stok barang modal yang ada

Adanya pertumbuhan adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Seperti halnya Goulet (Todaro :25) menyatakan bahwa ada tiga inti dari pembangunan yaitu : Kecukupan (*sustenance*), harga diri (*Self-esteem*), serta kebebasan (*freedom*). ketiga hal tersebut adalah tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan.

a. Tenaga Kerja (*Labor*)

Terkait dengan tenaga kerja (*labor*), beberapa teori pertumbuhan dan studi menegaskan adanya hubungan atau pengaruh antara sumberdaya manusia dengan pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari segi kuantitas sumber daya manusia, menurut Todaro dan Smith (2004) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja merupakan salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih besar, berarti meningkatkan tenaga kerja produktif. Sedangkan dari permintaan, penambahan jumlah penduduk berarti meningkatkan ukuran pasar domestik, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari Model Pertumbuhan Solow. Dengan mengacu pada model pertumbuhan Solow, suatu perekonomian dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempunyai persediaan modal per pekerja pada kondisi mapan yang rendah dan juga tingkat pendapatan yang rendah. Dengan kata lain, pertumbuhan penduduk yang tinggi cenderung menyulitkan perekonomian untuk mempertahankan tingkat modal per pekerja yang tinggi apabila pekerja tumbuh dengan cepat.

Menurut Solow dalam Mankiw (2002:194) selain investasi meningkatkan persediaan Modal dan depresiasi menurunkannya, Pertumbuhan jumlah pekerja juga akan menyebabkan modal per pekerja menurun (Y/L). perubahan persediaan Modal per pekerja dapat dilihat dari bentuk persamaan dibawah ini :

$$\Delta k = i - (\sigma + n)k$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi dan angkatan kerja mengurangi akumulasi modal manusia per pekerja lebih banyak dari depresiasi karena jumlah populasi n terus bertumbuh sepanjang waktu. Depresiasi mengurangi k dengan menghabiskan persediaan modal, sedangkan pertumbuhan populasi mengurangi k dengan menyebarkan persediaan modal dalam jumlah yang kecil diantara populasi pekerja yang lebih besar.

Pendapat lain terkait dengan pertumbuhan penduduk sebagai faktor pertumbuhan ekonomi juga dikemukakan oleh Becker dan Murphy dalam Wibowo (2008) yang berpendapat bahwa masyarakat dengan jumlah penduduk yang cukup banyak memiliki kecenderungan untuk meningkatkan investasi dibidang sumberdaya manusia sedangkan wilayah yang jarang penduduknya memiliki insentif ekonomi untuk meningkatkan jumlah anak untuk mengisi pasar tenaga kerja, namun peningkatan jumlah penduduk dapat menurunkan produktivitas karena adanya efek *diminishing returns* atas penggunaan sumber daya alam, sehingga hubungan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita tergantung dari pemanfaatan ilmu pengetahuan guna mengeliminasi efek *Diminishing returns* atas penggunaan sumber daya alam.

Dalam konteks Indonesia, studi tentang pertumbuhan ekonomi regional yang menggunakan kualitas sumberdaya manusia sebagai variable penjelas, menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

b. Level Awal PDRB

Berkaitan dengan Level Awal Pertumbuhan Ekonomi atau Level Awal PDRB, beberapa studi yang menggunakan level awal pertumbuhan ekonomi sebagai variable yang berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi, menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil studi Woller dan Philips (1998), dan Thiessen (2003), menyimpulkan bahwa semakin tinggi Level Awal PDRB maka akan semakin rendah pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya. Demikian halnya dengan Barry dan Jules (2008) yang berpendapat bahwa variable Level Awal PDRB merupakan variable yang penting dalam analisis pertumbuhan ekonomi untuk melihat tingkat konvergensi pertumbuhan ekonomi antar wilayah, dimana konvergensi ini mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan Level Awal PDRB. Artinya semakin tinggi Level Awal PDRB maka pertumbuhan di tahun berikutnya semakin rendah.

Berbeda dengan hasil kedua penelitian di atas, hasil studi Akai dan Sakata (2002) yang menggunakan level awal PDRB riil per kapita sebagai salah satu variabel kontrol yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB riil per kapita pada periode sebelumnya merupakan determinan penting dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi periode berjalan.

3. Desentralisasi fiskal

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang N0. 33 tahun 2004 dibagi menjadi tiga yaitu : desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat kedaerah

otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Menurut Bird (2003) dalam bukunya *fiscal decentralization in developing countries* mengatakan bahwa ada tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan daerah. Pertama, desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat keinstansi vertikal di daerah atau pemerintahan daerah. Kedua, delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Ketiga, devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang diperlu dikerjakan, berada di daerah.

Mekanisme kebijakan transfer ke daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana aloasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK). Secara nominal jenis transfer kedaerah dalam bentuk ini tercatat sebagai komponen terbesar dari dana transfer ke daerah.

Transfer daerah juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih terkait dengan pertumbuhan dan efisiensi alokasi sumber-sumber, seperti pemberian dorongan agar pemerintah daerah melaksanakan pembangunan pelayanan-pelayanan yang mendesak, atau untuk meningkatkan peyediaan pelayanan yang mengandung eksternalitas besar terhadap masyarakat yang berada diluar wilayah yang bersangkutan.

Secara umum Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut Kusaini (2006) desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan pemerintahan pusat.

Desentralisasi/otonomi daerah erat katannya dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dimana dalam hal ini dinyatakan pemerintahan dari pusat yang turun pada kewenangan pemerintah daerah. Menurut Mangkosoebroto (1999) fungsi/peranan pemerintah dalam perekonomian modern adalah sebagai berikut:

- i) Peranan Alokasi atau efisiensi, yaitu peranan pemerintah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan efisien yakni pembangunan yang berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal.

- ii) Peran distribusi, yaitu peranan pemerintah untuk mendistribusikan sumberdaya dan manfaat pemabangunan agar tercipta keadilan dalam masyarakat.
- iii) Peran Stabilisasi, yaitu Peranan pemerintah dalam menciptakan kestabilan dalam perekonomian sehingga menjamin ketenangan berusaha bagi setiap warga masyarakat.

Tujuan utama desentralisasi/otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan public dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Solihin : 2012). Desentralisasi akan mencegah terjadinya kepincangan didalam menguasai sumberdaya yang dimiliki dalam sebuah Negara. Penyelenggaran urusan pemerintahan ini jelas memiliki sasaran yang spesifik demi terwujudnya pembangunan yang merata. Lebih lajut Solihin (2012) mengemukakan beberapa kriteria peyelenggaraan urusan pemerintah yaitu;

- i) Kriteria eksternalitas; pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintah tersebut menjadi kewenangan kab/kota. Dan apabila nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- ii) Kriteria Akuntabilitas ; pertimbangan bahwa yang menangani sesuatu bagian urusan dalh tingkat pemerintah yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut.
- iii) Kriteria Efisiensi; pertimbangan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

Dalam pelaksanaannya, selama ini desentralisasi fiskal dikenal sebagai *money follow function* mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*). Dengan kata lain penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Berdasarkan prinsip *money follow function* Mahi (2002) menjelaskan bahwa kajian dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pada dasarnya dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *expenditure assignment* dan pendekatan *revenue assignment*. Pendekatan *expenditure assignment* menyebabkan peningkatan *local public goods*. Sedangkan pendekatan *revenue assignment* menyebabkan peningkatan kemampuan keuangan melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang terdesentralisasi.

Dalam Wibowo (2008) ada beberapa indikator desentralisasi fiskal yang sering digunakan oleh peneliti yang meneliti tentang desentralisasi ini. Penyusunan indikator ini tidaklah mudah, dilihat dari pergeseran otorisasi fiskal dari pusat ke daerah yang dapat ditinjau dari beberapa perspektif seperti dari sisi penerimaan, pengeluaran maupun dari sisi otonomi/tingkat kemandirian daerah.

Pada umumnya, pendelegasian fiskal sering dipandang sebagai penyerahan otoritas terkait dengan keputusan dalam pembangunan daerah. Semakin banyak kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, maka derajat desentralisasi fiskal semakin tinggi. Dibawah ini beberapa indikator desentralisasi fiskal yang sering digunakan oleh peneliti yang relevan dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan Wibowo (2008).

1. Indikator Penerimaan

Indikator desentralisasi fiskal yang diukur dari indikator penerimaan terdiri dari pendapatan daerah kotor/*gross local revenue* (RI-1) dan pendapatan daerah netto/*net local revenue* (RI-2). Indikator Pendapatan RI-1 merupakan rasio dari total pendapatan masing-masing pemerintah kabupaten/kota terhadap total penerimaan pemerintah pusat. Sedangkan Indikator Pendapatan (RI-2) merupakan rasio pendapatan masing-masing pemerintah kab/kota (dengan tidak memperhitungkan penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan yang bersifat *grants*) terhadap total pendapatan pemerintah pusat. Dengan demikian, Indikator Pendapatan RI-2, tidak memperhitungkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam total pendapatan daerah. Kedua indikator tersebut, dimaksudkan untuk melihat seberapa besar kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah berdasarkan total pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan.

2. Indikator Pengeluaran

Indikator Pengeluaran dalam desentralisasi fiskal terdiri dari pengeluaran tingkat kab/kota atau *local expenditure* (EI-1) dan pengeluaran tingkat provinsi/*provincial spending* (EI-2). Indikator Pengeluaran EI-1 merupakan rasio porsi pengeluaran/*expenditure share* Pemda Tk. II yaitu rasio total pengeluaran APBD seluruh kab/kota dalam satu provinsi dengan total APBD seluruhnya, yakni APBD kab/kota dan APBD provinsi yang bersangkutan. Sedangkan Indikator Pengeluaran EI-2 merupakan rasio total pengeluaran Pemda Tk. I dengan total pengeluaran pemerintah pusat.

3. Indikator Otonomi

Indikator otonomi didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu daerah boleh jadi memperoleh dana perimbangan yang kecil, namun pendelegasian fiskal daerah tersebut dapat dipandang cukup tinggi jika pemerintah daerah tersebut mampu mendanai belanjanya dengan Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah tersebut. Indikator otonomi ini terdiri dari berbagai ukuran keandirian fiskal yaitu; Rasio Total PAD terhadap total pendapatan masing-masing pemerintah kabupaten/kota (AI-1) dan Rasio PAD Terhadap total pengeluaran masing-masing kabupaten/kota (AI-2).

Semakin besar PAD yang diterima pemerintah daerah, maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan semakin mengecil

sehingga derajat desentralisasi fiskal semakin baik. Apabila besarnya tanggung jawab tersebut tidak dibarengi oleh kapasitas/kompetensi pegawai pemerintah, maka kebijakan pengelolaan fiskal daerah justru akan menghambat roda perekonomian daerah.

a. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pelaksanaan pembangunan nasional ataupun pertumbuhan nasional tidak terlepas dari peran dari setiap daerah-daerah dengan potensi yang dimiliki. Untuk mewujudkan pertumbuhan nasional atau khususnya pada pemerintahan provinsi, kondisi perekonomian pemerintah daerahlah sebagai acuan dan pendorong demi terwujudnya hal tersebut.

Banyak argument yang mendukung pelaksanaan desentralisasi seperti Bahn dan Linn (1992) berpendapat bahwa pendelegasian sebagian urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Lanjutnya dengan diserahkannya beberapa kewenangan ke pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara teori, desentralisasi fiskal diperkirakan akan memberikan peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah mempunyai kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibanding pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat

memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena berhadapan langsung dengan masyarakat yang bersangkutan (Wibowo, 2008). Lebih lanjut lagi Wibowo (2008) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi.

Temuan studi ini juga mendukung hasil studi Mursinto di Jawa Timur (2004). Hasil studi disimpulkan bahwa, pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil itu di ketahui bahwa pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi (PDRB) daerah. Untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (pertumbuhan ekonomi) tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi diperlukan peran serta swasta dan masyarakat yang semakin besar.

Menurut Oates (1977) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah subnasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan ditingkat pemerintah daerah akan lebih mudah tersampaikan untuk menentukan berbagai pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi

alokasi. Pembelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

Pandangan *pro-decentralization juga* dikemukakan oleh Thiesen (2003) yang mengemukakan empat argumentasi terkait dengan manfaat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu : *pertama*, bahwa peyediaan barang dan jasa publik secara seragam untuk setiap daerah secara umum adalah tidak efisien, hal ini dikarenakan marginal benefit dari pelayanan publik berbeda pada setiap daerah karena ketidak samaan permintaan barang atau jasa masing-masing daerah. Dengan desentralisasi, sumberdaya dapat disimpan dan dimanfaatkan pada waktu yang tepat sesuai kebutuhan pada masing-masing daerah.

Kedua, bahwa desentralisasi akan memunculkan kompetisi secara vertikal dan horizontal diantara tingkat pemerintahan yang berbeda, dimana hal tersebut akan mencegah terjadinya perilaku pemerintah yang cenderung untuk memaksimalkan tingkat pendapatan yang berpotensi merugikan para pemabayar pajak. Dengan demikian pemerintah akan lebih berkonsentrasi pada persaingan seperti mempertahankan pajak atau menurunkannya, dan memberikan fasilitas dan kemudahan bagi kegiatan bisnis, dengan menjaga tingkat pendapatan tertentu. Oleh karena itu,

masing-masing tingkatan pemerintah akan menggunakan anggaran secara efisien untuk membiayai pengeluaran sektor publik yang sesuai preferensi masyarakat atau pembayar pajak.

Ketiga, bahwa desentralisasi fiskal mendorong pemerintah lokal untuk secara aktif mencari inovasi dalam produksi dan penyediaan barang dan jasa publik. *Keempat*, bahwa desentralisasi akan mengurangi konsentrasi kekuatan politik, melemahkan pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kebijakan publik, dan mendorong demokrasi lokal.

Terlepas dari perspektif/pandangan tentang desentralisasi tersebut, pendapat dan argumentasi bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi cenderung lebih diterima secara luas. Hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan desentralisasi di sejumlah negara, termasuk diantaranya negara Indonesia. Hal ini menyiratkan bahwa terdapat keyakinan yang kuat dari negara-negara tersebut untuk melaksanakan desentralisasi fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Penelitian Terdahulu

Upaya untuk melihat hubungan atau pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan oleh para ahli dan peneliti sejumlah negara melalui berbagai penelitian dan kajian empiris. Beberapa peneliti pada umumnya menggunakan lebih dari satu indikator

atau ukuran desentralisasi fiskal, karena mengingat pendelegasian fiskal dari pusat ke daerah dapat ditinjau dari berbagai perspektif seperti dari sisi penerimaan, pengeluaran, dan dari sisi otonomi daerah.

Menurut Akai dan Sakata (2002) bahwa guna menguji secara statistic kontribusi dana transfer antar pemerintah terhadap kinerja ekonomi, perlu untuk menformulasikan kriteria desentralisasi fiskal secara kuantitatif. Semakin banyak kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, maka derajat desentralisasi fiskal semakin tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan Akai dan sakata (2002) menunjukkan adanya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, beberapa penelitian yang dilakukan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menghasilkan simpulan yang berbeda . beberapa penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana hasil penelitian Wibowo (2008) dan Waluyo (2007).

Hasil Studi Wibowo (2008) untuk melihat hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan model ekonometrika dan regresi data panel tingkat provinsi yaitu 29 provinsi di Indonesia yang mencakup periode sebelum dan setelah era desentralisasi fiskal yaitu tahun 1999-2004, dimana pertumbuhan ekonomi diukur dengan laju pertumbuhan PDRB perkapita, sedangkan variabel

desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan Indikator Pendapatan, Indikator Pengeluaran, dan Indikator Otonomi menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian Hadi Sasana (2006) juga menunjukkan adanya pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah dalam periode waktu 2001-2005 pada 35 kabupaten/kota yang ukuran desentralisasi fiskal diambil dari rasio pendapatan asli daerah ditambah dengan bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total pengeluaran pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah.

Secara lebih rinci simpulan, variabel dan metode yang digunakan dalam beberapa penelitian dan kajian empiris mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut ditunjukkan table 3 dibawah ini :

Tabel 3. Daftar Studi Empiris Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

<u>Penelitian</u>	<u>Data</u>	<u>Metode</u>	<u>Variabel Dependen</u>	<u>Variabel Kontrol</u>	<u>Ukuran Desentralisasi fiskal</u>	<u>Simpulan dan Hasil penelitian</u>
<u>Akai dan Sakata (2002)</u>	Data panel 50 negara bagian di USA, periode 1992-1996	Model regresi data panel dengan metode <i>Fixed Effect</i>	Rata-rata tingkat pertumbuhan <i>Gross State Product (GSP)</i> per kapita, periode 1992-1996	<ul style="list-style-type: none"> • Level awal pertumbuhan GSP • Rasio Lulusan SMA terhadap penduduk usia 18-24 • Pertumbuhan Penduduk • Porsi kursi democrat dilegislatif • Koefisien GINI • keterbukaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator pengeluaran: Rasio pengeluaran pemerintah daerah (<i>local</i>) terhadap pemerintah pusat (<i>local dan state</i>) • Indikator pendapatan: Rasio pendapatan pemerintah daerah (<i>local</i>) terhadap pemerintah pusat (<i>local dan state</i>) • Indikator Otonomi, terdiri dari 2 indikator: Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah (tidak termasuk <i>Federal grant</i>), dan Rasio PAD terhadap total Pendapatan daerah (termasuk <i>federal grant</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana Indikator pengeluaran dan Indikator pendapatan menunjukkan tanda positif tetapi tidak signifikan.
<u>Wibowo (2008)</u>	Data panel provinsi di Indonesia periode 1999-2004	Model regresi data panel dengan metode <i>Fixed Effect</i>	Tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Level Awal pertumbuhan PDRB • Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan SMP dan SMU • Pertumbuhan penduduk • Porsi nilai Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Pengeluaran terdiri dari 2 indikator: Rasio total pengeluaran pemerintah kab/kota dalam satu provinsi terhadap total pengeluaran pemerintah kab kota 	

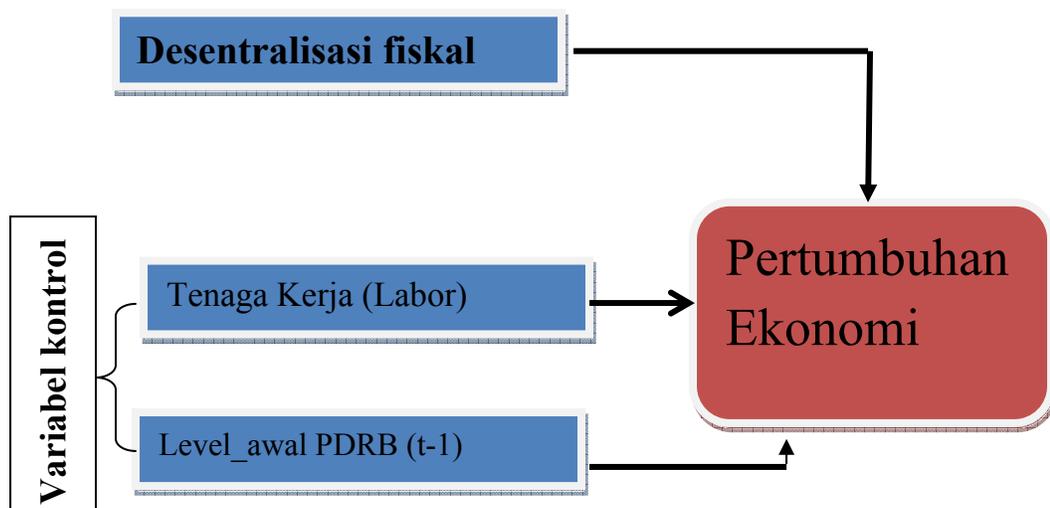
				<p>domestik dalam PDRB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porsi nilai ekspor dalam PDRB 	<p>dan provinsi, dan Rasio total pengeluaran pemerintah provinsi terhadap total pengeluaran pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator pendapatan terdiri dari 2 indikator: Rasio total pendapatan pemerintah kab/kota dan provinsi terhadap Total pendapatan pemerintah pusat. Rasio total pendapatan pemerintah kab/kota dan provinsi (tidak termasuk dana perimbangan) terhadap total pemerintah pusat • Indikator Otonomi, terdiri dari 4 Indikator: Rasio PAD kab/kota dalam satu provinsi terhadap total pendapatan (tidak termasuk dana perimbangan), Rasio PAD kab/kota dalam satu provinsi terhadap total pendapatan (termasuk dana perimbangan), Rasio PAD terhadap pengeluaran dan Rasio PAD terhadap Dana Perimbangan. 	
--	--	--	--	--	--	--

Hadi Sasana (2006)	Data panel 35 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2001-2005	<i>Analisis Jalur (Path Analysis)</i>	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Kerja terserap • Kesenjangan Ekonomi antar daerah • Kesejahteraan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio PAD ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan realisasi pengeluarantotal pemerintah kab/kota. 	Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. KERANGKA KONSEPTUAL

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya sendiri. Melalui program desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah akan menggali potensi daerahnya untuk kebutuhan daerah atau masyarakat daerah tersebut. Sehingga tingkat kemandirian daerah akan lebih jelas dengan pengelolaan keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah untuk mengelola keuangan dan potensi daerahnya, maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dari adanya pengadaan dan pelayanan barang publik yang dibutuhkan. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya melalui desentralisasi fiskal ini, turut berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Kerangka Konseptual



Gambar 2

Selanjutnya tenaga kerja (*Labor*) juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari peningkatan angka tenaga kerja yang produktif dan kreatif. Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan menyediakan tenaga kerja produktif, yang akan meningkatkan pendapatan perkapitanya dan modal per pekerja. Dari hal tersebut tenaga kerja (*Labor*) dapat memicu pertumbuhan ekonomi kearah positif. Selajutnya pertumbuhan Level Awal PDRB berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan PDRB pada periode sebelumnya merupakan determinan penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi periode berjalan. Secara sistematis dapat dilihat pada Gambar 2.

C. HIPOTESIS

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
2. Jumlah Tenaga Kerja (*Labor*) signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
3. Level Awal PDRB berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam upaya meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah, maka dalam konteks desentralisasi fiskal pemberian kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur belanja daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus diseimbangkan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah tersebut.
2. Berkaitan dengan faktor selain desentralisasi fiskal yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan tenaga kerja yang professional dan berpendidikan, karena variabel ini terbukti signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya untuk memperhatikan dan menambahkan variabel investasi fisik dan non fisik, indeks pengelolaan daerah serta kondisi sosial politik yang ada diwilayah penelitian karena variabel-variabel tersebut berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, Nobuto & Sakata, Massayo (2002). Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data For The Unite States. *Journal Of Urban Economics* 52 (2002) 93-108.
- Badan Pusat Statistika (BPS) Sumatera Barat. *Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha 2001-2005*. Padang : BPS (Badan Pusat statistika).
- , *Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha 2006-2010*. Padang : BPS (Badan Pusat statistika).
- , *Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat 2004-2008*. Padang : BPS (Badan Pusat statistika).
- , *Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat 2005-2009*. Padang : BPS (Badan Pusat statistika)
- , *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/kota Sumatera Barat 2002-2005*. Padang : BPS (Badan Pusat statistika)
- , *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/kota Sumatera Barat 2006-2007*. Padang : BPS (Badan Pusat statistika)
- , *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/kota Sumatera Barat 2008*. Padang : BPS (Badan Pusat statistika)
- , *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/kota Sumatera Barat 2009*. Padang : BPS (Badan Pusat statistika)
- , *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/kota Sumatera Barat 2010*. Padang : BPS (Badan Pusat statistika)
- Gujarati, Damondar.2006. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga
- Hasan, Iqbal. 2010. *Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Infrensif)*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Hidayat, Syarif, 2005. Too Much Too Soon ; Local States Elite’s Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy, Jakarta, Rajawali Pers
- M. Bird, Richard, & Francois, Vaillancourt. 2003. *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama